

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Revolutionary Law Firm, yang merupakan kantor hukum dan advokat yang bergerak di bidang litigasi dan non-litigasi, khususnya penanganan perkara pidana, perdata, serta pendampingan hukum kepada masyarakat. Pemilihan tempat PKL ini didasarkan pada relevansi bidang kerja dengan kompetensi mahasiswa hukum serta kebutuhan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum secara langsung dan profesional.

Pelaksanaan PKL dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh institusi pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari kerja: Senin sampai dengan Sabtu

Hari libur: Hari Minggu dan hari libur nasional (tanggal merah)

Jam kerja: Masuk kerja pukul 08.00 WIB. Pulang kerja pukul 16.00 WIB. Waktu kerja dapat melebihi pukul 16.00 WIB apabila terdapat penanganan perkara, penyusunan dokumen hukum, atau pekerjaan mendesak lainnya yang memerlukan penyelesaian segera.

Ketentuan waktu kerja tersebut mengikuti standar operasional dan kebutuhan kerja di Revolutionary Law Firm sebagai kantor hukum yang menangani perkara secara dinamis dan berkelanjutan.

2.2 Metode

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode partisipatif yang dimana metode ini adalah mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Kantor Revolutionary Law Firm.

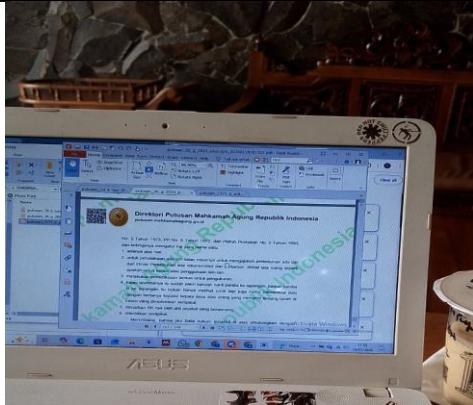
2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1.	Tanggal	02 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Menyusun Legal Opinion dan Legal Audit dalam dugaan mafia tanah dengan modus tanda tangan di AJB.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Saya bersama pembimbing lapangan melakukan identifikasi awal terhadap perkara dugaan mafia tanah, khususnya yang melibatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Identifikasi ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan hukum. Berdasarkan pelaksanaan penyusunan legal opinion dan legal audit tersebut, dapat disimpulkan bahwa AJB dengan indikasi pemalsuan tanda tangan merupakan instrumen utama dalam praktik mafia tanah. Legal opinion berfungsi sebagai pendapat hukum strategis, sedangkan legal audit berfungsi sebagai alat evaluasi kepatuhan dan deteksi pelanggaran hukum. Keduanya saling melengkapi dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban serta mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.
	Dokumentasi	

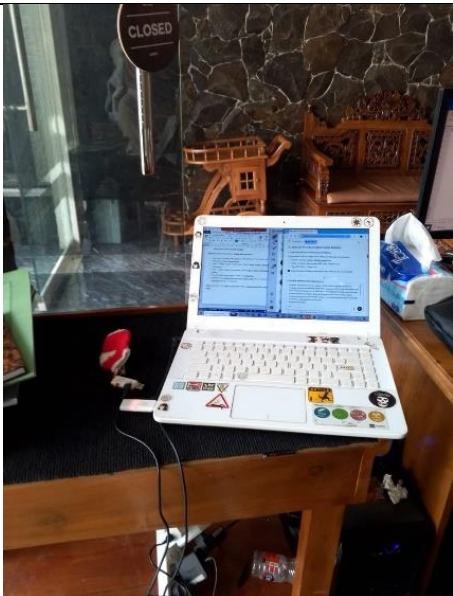
2.	Tanggal	03 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat surat terkait dugaan mafia tanah kepada para instansi.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Pembuatan surat terkait dugaan mafia tanah kepada instansi berwenang merupakan salah satu bentuk kegiatan advokasi hukum yang dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Revolutionary Law Firm. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan secara resmi dugaan tindak pidana pertanahan, khususnya yang melibatkan pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli (AJB), kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan penanganan perkara tersebut.
	Dokumentasi	
3.	Tanggal	04 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Memaparkan Legal Opinion dan Legal Audit terkait dugaan korupsi workshop dengan 5 tersangka Dinas Pendidikan Kota Blitar.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	pemaparan legal opinion dan legal audit tersebut memberikan gambaran awal mengenai kedudukan hukum para pihak yang terlibat, termasuk lima orang tersangka, serta menjadi dasar pertimbangan bagi penegak hukum dalam melanjutkan proses penyidikan secara profesional,

		transparan, dan berlandaskan asas kepastian hukum serta keadilan dari kasus yang ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya.
	Dokumentasi	
4.	Tanggal	05 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Kegiatan melayani konsultasi hukum PERCASI dilakukan sebagai bentuk pendampingan hukum terhadap organisasi olahraga dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan kegiatan organisasinya. Konsultasi hukum tersebut meliputi pemberian pendapat dan arahan hukum terkait tata kelola organisasi, kepengurusan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyelesaian potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan PERCASI. Melalui layanan konsultasi ini, diharapkan PERCASI dapat menjalankan aktivitas organisasinya secara tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

	Dokumentasi	
5	Tanggal	06 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat Kajian Hukum Kasus Rumah Sakit Mardiwaluyo.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	membuat kajian hukum kasus rumah sakit dilakukan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik dari aspek administratif, perdata, maupun pidana. Kajian ini mencakup penelaahan fakta hukum, kedudukan para pihak, serta kesesuaian tindakan rumah sakit dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Hasil kajian hukum tersebut memberikan gambaran awal mengenai potensi pelanggaran hukum dan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah hukum yang tepat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasien maupun institusi rumah sakit Mardiwaluyo.

	Dokumentasi	
6.	Tanggal	07 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Memimpin deklarasi kampung anti korupsi dan juga mafia tanah.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Memimpin deklarasi Kampung Anti Korupsi dan Anti Mafia Tanah dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan pertanahan di tingkat masyarakat. Deklarasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum, memperkuat komitmen bersama, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menolak segala bentuk praktik korupsi dan mafia tanah. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan kepastian hukum. Dan ini masih ada sangkut pautnya terkait kasus AJB dan pemalsuan tanda tangan.
	Dokumentasi	

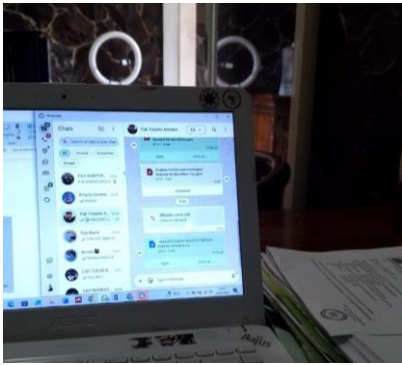
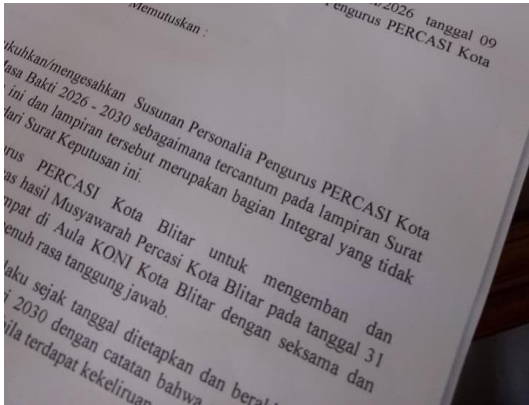
7.	Tanggal	09 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Mediasi terkait perda dan perwali dengan pedagang kaki lima.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	melakukan kegiatan mediasi terkait Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) dengan pedagang kaki lima dilaksanakan di Dinas Sosial (Dinsos) sebagai upaya penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan berkeadilan. Mediasi ini bertujuan menjembatani kepentingan pemerintah daerah dan pedagang kaki lima dengan memberikan penjelasan mengenai ketentuan Perda dan Perwali yang berlaku, sekaligus menampung aspirasi dan keberatan dari para pedagang yang berjualan di sekitar Alun alun Kota Blitar.
	Dokumentasi	
8.	Tanggal	10 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Koordinasi/ mediasi dengan tim formatur percasi.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Melakukan koordinasi dan mediasi dengan tim formatur PERCASI untuk membahas pembentukan kepengurusan serta menyelaraskan komunikasi antar pihak terkait. Pada pertemuan ini, merancang struktur kepengurusan dan

		juga AD/ART untuk percasi dan memberikan kuasa hukum untuk percasi agar berjalan sesuai SOP yang ada.
	Dokumentasi	
9.	Tanggal	11 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat laporan tentang bumdes dan lahan kosong.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun laporan mengenai kondisi dan potensi pengelolaan BUMDes serta pemanfaatan lahan kosong di wilayah desa.
	Dokumentasi	

10.	Tanggal	12 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Mengirim berkas di reskrim/ polres.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Mengantarkan dan menyerahkan berkas perkara ke unit Reskrim Polres untuk proses administrasi penanganan perkara Muallik kasus pengeroyokan dan didampingi oleh kuasa hukumnya.
	Dokumentasi	
11.	Tanggal	13 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Audiensi dan mediasi KTH dengan perum perhutani dan cabang dinas kehutanan Malang.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Mengikuti audiensi dan mediasi antara KTH dengan Perum Perhutani serta Cabang Dinas Kehutanan Malang terkait permasalahan pengelolaan kawasan hutan yang belum ada sertifikatnya. Dengan beberapa orang yang ikut di Dinas Kehutanan dan membawa lampiran bukti pelepasan TORA dan SK Biru dan juga bukti penyerahan sertifikat oleh bupati.

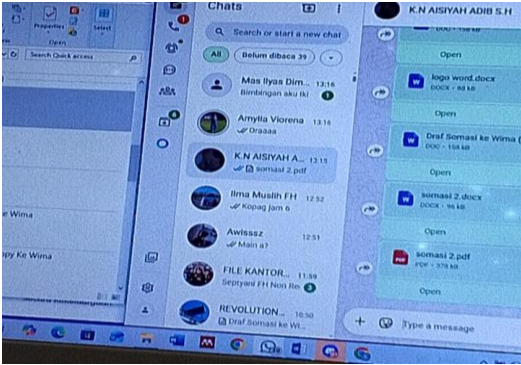
	Dokumentasi	
12.	Tanggal	14 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Survey tanah kosong di Blitar.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Melakukan survei lapangan terhadap lahan kosong di wilayah Blitar untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi pemanfaatannya berdasarkan yang tercantum di SK Biru. Tanah kosong tersebut berada di Jenglong, Jegu, dan Kruwuk. Lahan yang belum terdaftar sertifikat dan juga tidak jelas asal-usulnya.
	Dokumentasi	
13.	Tanggal	18 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Mempresentasikan terkait lahan kosong yang tidak tercantum di SK biru.

	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Mempresentasikan hasil identifikasi lahan kosong yang tidak tercantum dalam SK Biru kepada pihak terkait di Kejaksaan Kabupaten Blitar guna untuk kejelasan tanah yang belum bersertifikat dan juga tindak lanjut terkait sertifikat yang telah diberikan tetapi belum sesuai dengan SK Biru atau Surat keputusan yang ada.
	Dokumentasi	
14.	Tanggal	19 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Kunjungan ke dinas kebudayaan dan pariwisata.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Melakukan kunjungan dan koordinasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait pengembangan potensi daerah dan pemanfaatan lahan untuk wisata seperti pantai Pasur dan air terjun yang ada di Kruwuk.
	Dokumentasi	

15.	Tanggal	20 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat analisis usaha untuk wisata dan sesuai dengan hukum.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun analisis usaha pengembangan wisata dengan memperhatikan aspek kelayakan usaha dan ketentuan hukum yang berlaku. Guna untuk menindaklanjuti kunjungan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemarin.
	Dokumentasi	
16.	Tanggal	21 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat analisis terkait wisata kemarin dan merevisinya kembali lalu mengirimkannya kepada yang bersangkutan.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Membuat analisis wisata yang ada di Pantai Pasur dan air terjun di Kruwuk dengan beberapa revisi guna untuk keamanan dan juga aturan hukum yang ada lalu mengirimkannya kepada pihak terkait untuk tindak lanjut.
	Dokumentasi	

17.	Tanggal	23 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat surat PERCASI Kota Blitar dan dikirim kepada yang bersangkutan.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun surat resmi PERCASI Kota Blitar, mulai dari perumusan isi, pengecekan format administrasi, hingga mengirimkan surat tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk tujuan koordinasi dan informasi resmi organisasi.
	Dokumentasi	
18.	Tanggal	24 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Koordinasi terkait SK yang sudah jadi dengan KONI.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Melakukan koordinasi dengan KONI terkait SK yang telah diterbitkan, termasuk memastikan keabsahan dokumen, menindaklanjuti administrasi, dan menyampaikan informasi resmi kepada pihak terkait bahwasannya Surat Keputusan dan juga susunan pesonalia telah dibuat dengan kuasa hukum dari Revolutionary Law Firm.

	Dokumentasi	
19.	Tanggal	25 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat laporan dan surat kuasa dari klien yang terkena pinjol.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun laporan dan surat kuasa dari klien yang terdampak pinjaman online (pinjol), termasuk merinci kronologi kasus, mengidentifikasi hak-hak klien, dan menyiapkan dokumen resmi untuk keperluan penanganan hukum di kantor advokat untuk pendampingan jika klien di datangi oleh debt kolektor.
	Dokumentasi	

20	Tanggal	26 Februari 2026
		SAKIT
21.	Tanggal	27 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat somasi 2 oleh Wima terkait tanah kebun kopi Karanganyar.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun Somasi II atas nama Wima terkait sengketa tanah kebun kopi di Karanganyar, termasuk merumuskan isi somasi secara hukum, menyesuaikan dengan bukti dan dokumen yang ada, serta menyiapkan surat resmi untuk dikirimkan kepada pihak tergugat. Kegiatan ini meliputi perumusan dasar hukum somasi berdasarkan ketentuan KUHPerdara, penyusunan argumentasi hukum atas penguasaan objek sengketa oleh pihak lawan, penyesuaian isi somasi dengan bukti administrasi pertanahan yang tersedia, serta penyusunan surat resmi somasi lanjutan yang ditujukan kepada pihak tergugat sebagai bentuk peringatan hukum sebelum ditempuh upaya litigasi.
	Dokumentasi	
22.	Tanggal	1 Februari 2026
	Jenis Kegiatan	Menghadiri acara undangan di Muesum PETA dalam rangka hari pers nasional.
	Uraian Pelaksanaan	Menghadiri undangan resmi di Museum PETA dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional, mengikuti rangkaian kegiatan, mencatat materi dan informasi yang disampaikan,

	dan Penjelasan	serta mendokumentasikan kegiatan sebagai bagian dari pembelajaran hukum dan administrasi terkait acara publik yang disampaikan oleh walikota dan para media.
	Dokumentasi	
23.	Tanggal	2 Maret 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat surat laporan dari klien dan surat undangan untuk PERCASI.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun surat laporan dari klien dengan melakukan pengumpulan data, perumusan kronologi permasalahan, serta penyusunan isi laporan secara sistematis sesuai dengan kaidah administrasi dan kebutuhan hukum. Selain itu, menyusun surat undangan resmi untuk PERCASI dengan memperhatikan struktur persuratan organisasi, mulai dari penentuan agenda, penyusunan isi surat, pengecekan format administratif, hingga finalisasi dokumen resmi yang siap disampaikan kepada pihak terkait..

	Dokumentasi	
24.	Tanggal	3 Maret 2026
	Jenis Kegiatan	Membuat kerangka surat mediasi untuk mediator terkait sengketa tanah.
	Uraian Pelaksanaan dan Penjelasan	Menyusun kerangka surat mediasi untuk mediator terkait sengketa tanah, mencakup perumusan pokok permasalahan, identifikasi pihak yang bersengketa, serta penyiapan dokumen pendukung agar mediasi dapat berjalan efektif dan sesuai prosedur hukum. Dari kasus pak Ali dan pak Pur terkait penanaman hutan yang hingga saat ini belum selesai.
	Dokumentasi	